MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

ANALISIS DAMPAK PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

Tri Lasmini Utari[1], Levy Oktridarti[2], Shinta Wiji Rahayu[3]

[1 2 3]Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Ratu Samban

Email: *trilasminiutari@gmail.com*

ABSTRAK

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi sebagai tolok ukur krusial untuk mengevaluasi efektivitas pembangunan di suatu wilayah, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standar kelayakan hidup. Pemerintah Indonesia telah menginisiasi beragam program bantuan sosial yang berperan sebagai sarana perlindungan sosial guna meningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Beberapa contohnya meliputi Kajian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana program bantuan sosial, termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), berpengaruh terhadap perbaikan IPM di Kabupaten Bengkulu Utara. Analisis akan meliputi pemanfaatan bantuan oleh warga, kontribusi program pada dimensi pembangunan manusia, serta berbagai hambatan dalam pelaksanaan program tersebut.

Studi ini mengadopsi metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan informasi dilaksanakan melalui pengamatan langsung, sesi wawancara terperinci, serta telaah dokumen. Partisipan penelitian mencakup individu penerima bantuan sosial, fasilitator sosial, dan aparatur di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara. Pemilihan partisipan didasarkan pada kriteria tertentu melalui metode purposive sampling. Proses analisis data mengikuti kerangka interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan sintesis kesimpulan.

Penelitian menunjukkan bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) membantu rumah tangga memenuhi kebutuhan pangan mereka dan meningkatkan daya beli masyarakat. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) membantu meningkatkan akses terhadap pendidikan, mengurangi angka putus sekolah, dan mendorong keluarga dengan pendapatan rendah untuk terus belajar. Sebaliknya, tujuan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. meskipun terdapat tantangan yang teridentifikasi, seperti lamanya waktu tunggu pelayanan dan keterbatasan sarana kesehatan. Ketiga program ini secara kolektif memberikan kontribusi pada peningkatan aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak, yang merupakan elemen fundamental dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Namun demikian, efektivitas implementasi program masih dipengaruhi oleh ketidaktepatan sasaran penerima, keterbatasan akses pelayanan, biaya transportasi, serta stigma sosial terhadap penerima bantuan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan agar program bantuan sosial semakin tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Utara.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, BPNT, KIP, KIS, Indeks Pembangunan Manusia, Kabupaten Bengkulu Utara.

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

ABSTRACT

The Human Development Index (HDI) is an important indicator for measuring regional development through the dimensions of health, education, and decent living standards. The Indonesian government has implemented several social assistance programs, including the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT), Indonesia Smart Card (KIP), and Indonesia Health Card (KIS), as instruments of social protection to improve community welfare. This study aims to analyze the impact of these social assistance programs on the Human Development Index in North Bengkulu Regency by examining their utilization, contribution to human development dimensions, and implementation challenges.

This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving beneficiaries, social facilitators, and officials from the North Bengkulu Social Affairs Office selected through purposive sampling. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings indicate that BPNT contributes to household food security and maintains purchasing power. The KIP program improves educational access, reduces school dropout rates, and supports educational continuity for students from low-income families. Meanwhile, KIS facilitates better access to healthcare services despite challenges related to service queues and limited health facilities. Overall, these programs positively contribute to the education, health, and decent living dimensions of the Human Development Index. Nevertheless, several implementation challenges remain, including inaccurate beneficiary targeting, limited service accessibility, transportation costs, and social stigma toward beneficiaries. Therefore, continuous policy evaluation is necessary to improve program effectiveness and support sustainable human development in North Bengkulu Regency.

Keywords: Social Assistance, BPNT, KIP, KIS, Human Development Index, North Bengkulu Regency.

PENDAHULUAN

Pengembangan sumber daya manusia adalah sebuah kerangka konseptual pembangunan yang memprioritaskan individu sebagai fokus sentral. Peningkatan kualitas kehidupan, yang ditunjukkan oleh peningkatan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak, bukanlah satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibuat oleh Program Pembangunan Dunia (UNDP). Di wilayah Indonesia, IPM berfungsi sebagai tolok ukur penting untuk mengevaluasi seberapa efektif pencapaian pembangunan di tingkat nasional dan regional. Kabupaten Bengkulu Utara telah memperlihatkan indikasi perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang positif selama beberapa tahun belakangan. Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Bengkulu Utara tercatat sebesar 73,10, yang menandakan kemajuan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan riil per kapita. Namun demikian, masih ada sejumlah persoalan yang perlu diatasi, termasuk kemiskinan, kendala dalam memperoleh layanan kesehatan, terbatasnya kapasitas ekonomi sebagian populasi, serta disparitas dalam kesempatan pendidikan, yang semuanya berpotensi menghambat peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia.

Dalam upaya mengatasi Menanggapi isu tersebut, pemerintah telah menginisiasi beragam program jaminan sosial, termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia

Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah program yang dirancang untuk membantu orang-orang kurang mampu memenuhi kebutuhan primer mereka, meningkatkan peluang pendidikan, dan meningkatkan akses ke layanan kesehatan.

Secara teoretis, bantuan sosial diharapkan tidak hanya meringankan beban finansial keluarga, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memperbaiki taraf hidup, sesuai dengan kerangka ***Capability Approach*** yang dikemukakan oleh Amartya Sen dan ***Human Capital Theory*** yang dikembangkan oleh Gary Becker.

Tinjauan literatur sebelumnya secara umum mengindikasikan bahwa bantuan sosial berkontribusi positif terhadap perbaikan taraf hidup masyarakat dan kemajuan pembangunan sumber daya manusia. Akan tetapi, mayoritas studi masih menerapkan metode kuantitatif yang menitikberatkan pada korelasi statistik antarvariabel. Metode tersebut belum memadai untuk menguraikan pengalaman para penerima, mekanisme pelaksanaan program, serta berbagai tantangan yang muncul di tingkat operasional. Fenomena ini menggarisbawahi adanya ***kesenjangan penelitian*** yang memerlukan investigasi lebih lanjut melalui metode kualitatif guna mendalami persepsi serta realitas masyarakat.

Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan evaluasi simultan dari tiga program bantuan sosial: Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia. Metode kualitatif digunakan untuk menyajikan aspek baru. Dampak bantuan sosial terhadap komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak hanya dibahas dalam penelitian ini.
tetapi juga menyoroti berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan tersebut mencakup masalah ketepatan sasaran, keterbatasan dalam memperoleh layanan, beban biaya transportasi, serta stigma sosial yang masih dirasakan oleh para penerima manfaat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan pemahaman yang lebih mendalam terkait efektivitas program bantuan sosial sebagai sarana peningkatan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bengkulu Utara.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metodologi kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Pemilihan metodologi kualitatif didasarkan pada kemampuannya untuk menyajikan pemahaman komprehensif terkait penggunaan program bantuan sosial oleh populasi, sejalan dengan dampaknya terhadap kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi pengalaman, pandangan, serta situasi aktual yang dirasakan oleh individu yang menerima manfaat dari program bantuan sosial di Wilayah Bengkulu Utara.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Lokasi dipilih secara purposive karena wilayah ini masih menerima alokasi program bantuan sosial pemerintah, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Selain itu, Kabupaten Bengkulu Utara masih menghadapi tantangan pembangunan manusia terkait pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan menggunakan teknik purposive sampling, informan penelitian dipilih secara sengaja karena mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Penerima manfaat adalah anggota informan. program BPNT, KIP, dan KIS, pendamping sosial, serta pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan sosial.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung terhadap kondisi penerima bantuan sosial. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Dinas

Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, Badan Pusat Statistik (BPS), regulasi pemerintah, laporan program bantuan sosial, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan penelitian.

Metode pengumpulan data terdiri dari tiga tahap. Pertama, pengamatan langsung terhadap keadaan sosial dan ekonomi orang-orang yang menerima bantuan. Kedua, wawancara mendalam—atau wawancara mendalam—dilakukan dengan menggunakan protokol wawancara semi-terstruktur. Ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih menyeluruh. Ketiga, dokumentasi adalah pengumpulan laporan pemerintah, data statistik pendukung, laporan penerima manfaat, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan sosial.

Untuk menguji validitas data, triangulasi sumber dan teknik digunakan. Triangulasi sumber membandingkan informasi yang diperoleh dari penerima bantuan sosial, pendamping sosial, dan pihak Dinas Sosial; triangulasi teknik membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data menggunakan model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang terdiri dari tiga langkah: pengurangan data, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dipilih untuk reduksi data. Data juga disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan interpretasi. Pada langkah terakhir, temuan penelitian dievaluasi secara terus-menerus untuk menentukan hubungannya satu sama lain.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan dua landasan teori utama. Pertama, *Capability Approach* dari Amartya Sen yang menekankan bahwa pembangunan harus memperluas kemampuan (capabilities) individu dalam menjalani kehidupan yang bernilai. Kedua, *Human Capital Theory* dari Gary Becker yang menjelaskan bahwa investasi pada bidang pendidikan dan kesehatan merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Kedua teori tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana program bantuan sosial berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bengkulu Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Program Bantuan Sosial di Kabupaten Bengkulu Utara

Salah satu alat penting yang dimiliki pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan adalah program bantuan sosial. Di Kabupaten Bengkulu Utara, bantuan sosial disediakan melalui berbagai program yang terintegrasi dalam sistem perlindungan sosial nasional, termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menunjukkan bahwa rumah tangga miskin dan rentan adalah subjek dari ketiga program tersebut.

Sebagian besar orang yang diwawancarai berpendapat bahwa bantuan sosial sangat membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Program BPNT membantu memenuhi kebutuhan pangan setiap bulan, KIP meringankan biaya pendidikan anak, dan KIS memudahkan akses ke layanan kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah.

Meskipun demikian, pelaksanaan program belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa informan menyampaikan masih terdapat ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, keterlambatan pencairan, serta keterbatasan informasi mengenai mekanisme pembaruan data penerima manfaat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas bantuan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola program di tingkat daerah.

Dampak Program BPNT terhadap Standar Hidup Layak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat. Bantuan yang diterima setiap bulan digunakan untuk membeli kebutuhan pangan pokok sehingga mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

Sebagian besar informan menjelaskan bahwa sebelum memperoleh BPNT mereka mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pangan secara rutin. Setelah memperoleh bantuan, pengeluaran untuk kebutuhan pokok menjadi lebih ringan sehingga sebagian pendapatan dapat dialihkan untuk kebutuhan lain seperti biaya pendidikan anak, transportasi, dan kebutuhan kesehatan.

Temuan ini menunjukkan bahwa BPNT berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang mampu menjaga daya beli masyarakat miskin. Dalam perspektif pembangunan manusia, kemampuan memenuhi kebutuhan pangan merupakan prasyarat dasar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Rumah tangga yang memiliki kecukupan pangan cenderung memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik sehingga secara tidak langsung mendukung peningkatan dimensi kesehatan dalam Indeks Pembangunan Manusia.

Namun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala, seperti keterlambatan distribusi bantuan dan keterbatasan pilihan komoditas pangan yang tersedia pada e-warong. Beberapa penerima manfaat juga mengharapkan fleksibilitas penggunaan bantuan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga masing-masing.

Temuan ini sesuai dengan penelitian Anawati dan Febriyastuti (2025) yang menyebutkan bahwa bantuan pangan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengurangi beban pengeluaran konsumsi di rumah tangga. Sehingga, BPNT tidak hanya sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi alat yang membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu melalui pembangunan manusianya.

Dampak Program KIP terhadap Dimensi Pendidikan

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah salah satu upaya pemerintah yang digunakan untuk berinvestasi di bidang pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan bahwa bantuan pendidikan yang mereka terima berhasil membantu mengurangi biaya sekolah, khususnya untuk membeli perlengkapan belajar, seragam, buku, dan ongkos transportasi.

Keberadaan KIP memberikan motivasi kepada orang tua untuk mempertahankan anak tetap bersekolah. Sebelum memperoleh bantuan, beberapa keluarga mengaku mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan akibat keterbatasan ekonomi. Setelah memperoleh KIP, risiko anak putus sekolah dapat diminimalkan karena sebagian kebutuhan pendidikan telah ditanggung oleh pemerintah.

Selain memberikan manfaat ekonomi, KIP juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Orang tua mulai memandang pendidikan bukan sekadar kewajiban, tetapi sebagai sarana meningkatkan kualitas hidup keluarga pada masa mendatang.

Meskipun begitu, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah bantuan yang diberikan belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan pendidikan. Kenaikan biaya sekolah dan kebutuhan perlengkapan sekolah membuat sebagian orang tua masih harus mengeluarkan uang tambahan yang jumlahnya cukup besar.

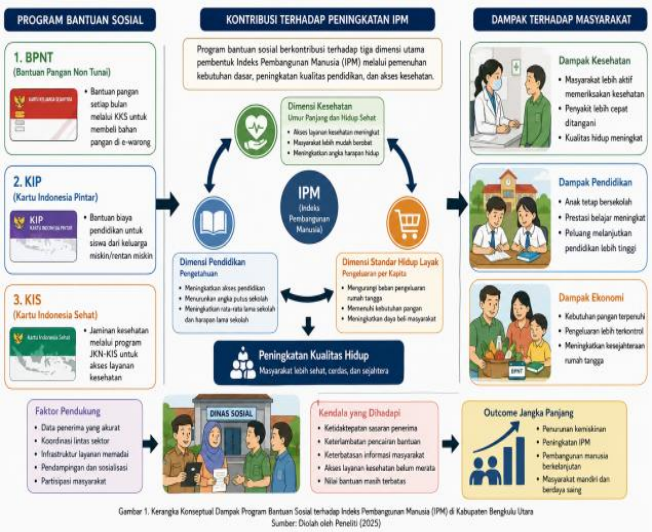
Menurut teori sumber daya manusia Becker, pendidikan adalah investasi yang akan meningkatkan produktivitas individu di masa depan. Oleh karena itu, bantuan pendidikan melalui KIP dapat memberikan manfaat jangka pendek, seperti mengurangi biaya sekolah.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

Selain itu, kualitas sumber daya manusia dapat meningkat, yang pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

.

Hasil penelitian ini juga mendukung beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa bantuan pendidikan dapat meningkatkan jumlah siswa yang ikut sekolah dan mengurangi jumlah siswa yang keluar dari sekolah pada masyarakat dengan penghasilan rendah.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Dampak Program Bantuan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bengkulu Utara
Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Dampak Program KIS terhadap Dimensi Kesehatan

Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian, hampir seluruh informan menyatakan bahwa keberadaan KIS membantu mengurangi beban biaya berobat sehingga masyarakat tidak lagi menunda pemeriksaan kesehatan karena alasan ekonomi.

Melalui KIS, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas maupun rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Hal tersebut meningkatkan frekuensi kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan serta mendorong perilaku hidup yang lebih sehat.

Namun demikian, penelitian menemukan beberapa kendala dalam implementasi KIS, antara lain antrean pelayanan yang cukup panjang, keterbatasan tenaga kesehatan, serta lokasi fasilitas kesehatan yang relatif jauh dari tempat tinggal sebagian masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan manfaat program belum dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima bantuan.

Dalam perspektif Capability Approach yang dikembangkan oleh Amartya Sen, kesehatan merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap individu agar dapat menjalani kehidupan secara produktif. Oleh karena itu, keberadaan KIS tidak hanya memberikan perlindungan finansial terhadap biaya kesehatan, tetapi juga memperluas kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Hasil dari studi ini mengindikasikan bahwa memperluas akses terhadap layanan keseh atan melalui KIS memainkan peran penting dalam perbaikan aspek kesehatan dalam Indeks Pe mbangunan Manusia, meskipun dampaknya masih tergantung pada ketersediaan sarana keseh atan di wilayah tersebut.

Kontribusi Program Bantuan Sosial terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sosial yang terdiri atas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) memberikan kontribusi positif terhadap tiga dimensi utama pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Meskipun kontribusi tersebut tidak secara langsung meningkatkan nilai IPM dalam jangka pendek, bantuan sosial mampu memperkuat faktor-faktor yang menjadi indikator pembentuk IPM.

Dalam aspek standar kehidupan yang pantas, BPNT berperan dalam memperkuat kapasitas keluarga untuk mencukupi kebutuhan pangan, sehingga pengeluaran rumah tangga menjadi lebih hemat. Pengurangan beban konsumsi memberi kesempatan bagi sebagian pendapatan untuk dialokasikan ke keperluan lain yang lebih berguna, seperti biaya pendidikan anak dan kebutuhan kesehatan keluarga. Situasi ini menggambarkan peningkatan kesejahteraan rumah tangga sebagai salah satu sasaran utama dari perlindungan sosial.

Pada dimensi pendidikan, KIP memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk tetap melanjutkan pendidikan. Bantuan pendidikan mampu menekan risiko putus sekolah, meningkatkan angka partisipasi sekolah, serta memberikan motivasi kepada orang tua untuk terus mendukung pendidikan anak. Dampak ini menjadi penting karena peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator utama dalam penghitungan IPM.

Sementara itu, pada dimensi kesehatan, KIS memberikan akses yang lebih luas terhadap pelayanan kesehatan dasar. Kemudahan memperoleh layanan kesehatan mendorong masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sehingga risiko penyakit yang tidak tertangani dapat dikurangi. Dalam jangka panjang kondisi tersebut diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan angka harapan hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan bahwa ketiga program bantuan sosial saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga. BPNT memenuhi kebutuhan konsumsi, KIP menjamin keberlangsungan pendidikan anak, sedangkan KIS memberikan perlindungan terhadap risiko kesehatan. Sinergi ketiga program tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia tidak dapat dicapai melalui satu intervensi saja, tetapi memerlukan kebijakan yang terintegrasi.

Kendala Implementasi Program Bantuan Sosial

Meskipun memiliki dampak yang konstruktif, investigasi mengidentifikasi sejumlah hambatan yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan program subsidi di Kabupaten Bengkulu Utara.

1. Ketidaktepatan Sasaran Penerima

Mayoritas responden mengemukakan bahwa masih ada individu yang seharusnya menerima bantuan namun belum terdaftar sebagai penerima. Sebaliknya, terdapat pula penerima yang kondisi ekonominya telah membaik tetapi tetap menerima subsidi. Situasi ini mengindikasikan bahwa mekanisme pembaharuan data penerima bantuan memerlukan penyempurnaan guna memastikan alokasi bantuan yang lebih tepat pada sasaran yang dituju.

2. Keterbatasan Informasi

Masih terdapat masyarakat yang belum memahami mekanisme pengusulan, pembaruan data, maupun proses pengaduan apabila terjadi kesalahan data penerima bantuan. Kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat sering mengalami kesulitan ketika ingin memperbarui data kependudukan atau mengajukan keberatan terhadap status kepesertaan bantuan sosial.

3.Keterbatasan Infrastruktur Pelayanan

Pada program KIS, beberapa informan menyampaikan bahwa jarak menuju fasilitas kesehatan relatif jauh dan jumlah tenaga kesehatan masih terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan waktu tunggu pelayanan menjadi cukup lama sehingga sebagian masyarakat memilih menunda pemeriksaan kesehatan.

4. Nilai Bantuan yang Terbatas

Sebagian penerima manfaat menilai bahwa besaran bantuan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga akibat meningkatnya harga kebutuhan pokok dan biaya pendidikan. Oleh karena itu, bantuan sosial masih dipandang sebagai stimulus untuk mengurangi beban ekonomi, bukan sebagai solusi permanen terhadap kemiskinan.

Pembahasan Berdasarkan Capability Approach

Temuan penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sosial tidak hanya memberikan manfaat berupa transfer sumber daya ekonomi, tetapi juga memperluas kemampuan (capabilities) masyarakat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Menurut Amartya Sen, pembangunan manusia harus dipahami sebagai proses memperluas kebebasan individu untuk memilih kehidupan yang bernilai. Dalam konteks penelitian ini, BPNT memperluas kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pangan yang layak, KIP memperluas kesempatan memperoleh pendidikan, sedangkan KIS memperluas akses terhadap pelayanan kesehatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Anak-anak memiliki peluang lebih besar menyelesaikan pendidikan, masyarakat lebih mudah memperoleh pelayanan kesehatan, dan rumah tangga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Namun demikian, kemampuan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas publik, kualitas pelayanan, serta ketepatan sasaran program. Oleh karena itu, bantuan sosial perlu didukung oleh kebijakan pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi agar kemampuan masyarakat terus berkembang.

Pembahasan Berdasarkan Human Capital Theory

Human Capital Theory yang dikemukakan oleh Gary Becker menjelaskan bahwa investasi pada pendidikan dan kesehatan merupakan faktor utama dalam meningkatkan produktivitas sumber daya manusia.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial berperan sebagai bentuk investasi pemerintah terhadap modal manusia (human capital). KIP meningkatkan investasi pendidikan melalui keberlanjutan sekolah, sedangkan KIS meningkatkan investasi kesehatan melalui kemudahan memperoleh pelayanan medis.

Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan perlindungan sosial, tetapi juga sebagai strategi pembangunan ekonomi jangka panjang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Anawati dan Febriyastuti (2025) yang menyatakan bahwa program bantuan sosial memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan IPM melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian I Made Giri Suyasa dkk. (2022) yang menjelaskan

bahwa bantuan sosial mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga meskipun masih ditemukan berbagai kendala dalam penargetan penerima manfaat. Selain itu, hasil penelitian mendukung berbagai penelitian mengenai efektivitas BPNT dalam menjaga ketahanan pangan rumah tangga, KIP dalam meningkatkan akses pendidikan, serta KIS dalam memperluas akses pelayanan kesehatan.

Perbedaan krusial karya ilmiah ini dengan studi terdahulu adalah pada metodologi yang diadopsi. Umumnya, investigasi terdahulu memanfaatkan metodologi kuantitatif, yang terbatas pada penjabaran relasi antarparameter. Sebaliknya, riset ini mengadopsi metodologi kualitatif, memungkinkan pemaparan mendalam mengenai pengalaman subjek penerima manfaat, pandangan kolektif masyarakat, serta berbagai hambatan dalam realisasi program secara holistik. Oleh karena itu, penelitian ini menyumbangkan wawasan empiris yang lebih substansial pada diskursus pemberdayaan manusia yang bersandar pada program bantuan sosial.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

1. Melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial secara berkala agar bantuan lebih tepat sasaran.
2. Meningkatkan koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan pemerintah desa dalam pelaksanaan program bantuan sosial.
3. Memperluas akses pelayanan kesehatan terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan.
4. Meningkatkan sosialisasi mengenai mekanisme program bantuan sosial sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai penerima manfaat.
5. Mengintegrasikan program bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat agar penerima bantuan dapat bertransformasi menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi.

KESIMPULAN

Studi ini mengevaluasi pengaruh skema bantuan sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bengkulu Utara dengan melihat bagaimana tiga program utama digunakan: Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Temuan dari studi ini mengindikasikan bahwa ketiga program tersebut secara kolektif berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas taraf hidup warga, yang tercermin dalam peningkatan sektor kesehatan, pendidikan, dan standar living yang memadai, seluruhnya merupakan elemen fundamental dalam pengukuran IPM.

Program BPNT meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan daya beli keluarga. Dengan mengurangi beban konsumsi, keluarga dapat mengalokasikan pendapatan mereka untuk kebutuhan lain yang produktif, seperti pendidikan dan kesehatan. Program KIP telah terbukti meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, mengurangi risiko putus sekolah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Sementara itu, KIS memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh layanan medis tanpa terbebani biaya pengobatan yang tinggi.

Namun demikian, penerapan program bantuan sosial masih dihadapkan pada beragam rintangan. Ketidakakuratan identifikasi penerima manfaat yang tepat, keterbatasan dalam memperbarui data sosial ekonomi, distribusi pelayanan kesehatan yang tidak merata, serta

minimnya informasi mengenai prosedur penyaluran bantuan merupakan elemen-elemen yang berdampak pada keberhasilan pelaksanaan program. Dengan demikian, perbaikan mutu pengelolaan bantuan sosial perlu dilaksanakan secara terus-menerus agar faedah program dapat dirasakan secara lebih adil oleh kelompok masyarakat yang paling memerlukan.

Berdasarkan perspektif Capability Approach, bantuan sosial terbukti memperluas kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh pendidikan, dan mengakses layanan kesehatan. Sementara itu, berdasarkan Human Capital Theory, program bantuan sosial merupakan investasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai kebijakan strategis untuk mendorong pembangunan manusia yang berkelanjutan.

IMPLIKASI PENELITIAN

Penelitian ini memberi tahu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan tentang cara meningkatkan kinerja program bantuan sosial.

1. Pemerintah perlu melakukan pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala agar ketepatan sasaran penerima bantuan semakin meningkat.
2. Koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, pemerintah desa, dan pendamping sosial perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat.
3. Pemerintah perlu meningkatkan pemerataan fasilitas kesehatan, khususnya pada wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses pelayanan kesehatan.
4. Program bantuan sosial sebaiknya diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga penerima bantuan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
5. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan mixed methods atau pendekatan kuantitatif dengan cakupan wilayah yang lebih luas agar hubungan antara bantuan sosial dan IPM dapat dianalisis secara lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Ratu Samban, Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara, seluruh informan penelitian, pendamping sosial, serta masyarakat penerima manfaat program bantuan sosial yang telah memberikan informasi dan dukungan selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Amartya Sen. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.

Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education* (3rd ed.). The University of Chicago Press.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024*. BPS Kabupaten Bengkulu Utara.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Kabupaten Bengkulu Utara dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Bengkulu Utara.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar*.

BPJS Kesehatan. (2023). *Pedoman Program Jaminan Kesehatan Nasional*.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

United Nations Development Programme. (2023). *Human Development Report 2023/2024*. UNDP.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial.

Anawati, T., & Febriyastuti, R. (2025). The Effect of Social Assistance Programs on Human Development Index in Central Java. *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan*.

Suyasa, I. M. G., dkk. (2022). Tepatkah Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia? *Salus Cultura*.

Susanti, R. (2023). Dampak Bantuan Pangan Non Tunai terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga. *Jurnal Kebijakan Sosial*.

Kuntarto. (2022). Social Assistance and Health Expenditure among Poor Households. *Journal of Social Policy Studies*.

Syafiq. (2023). Efektivitas Bantuan Sosial terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.

Aulia, T. R. (2021). Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*.

Tristanto. (2020). Konsep Bantuan Sosial dalam Perspektif Perlindungan Sosial. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*.